

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan mempunyai tujuan yaitu berusaha mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan bertahap di segala sektor maupun subsektor secara terencana dan terprogram. Salah satu cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya pembangunan ekonomi. Pembangunan juga merupakan upaya multi dimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006 dalam Permatasari, 2011:1).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2007:3).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perlu kerja sama antara pemerintah dan masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.

Pemulihan perekonomian Indonesia didorong oleh membaiknya ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta Maluku dan Papua pada tahun 2016. Di wilayah tersebut tercatat pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tumbuh 4,29 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,53 persen (Lampiran 1) (BPS Indonesia, 2017).

Indonesia adalah salah satu negara agraris di dunia. Sektor pertanian masih memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS (2017) sektor pertanian memiliki kontribusi bagi Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2017 sebesar yaitu 13,14 persen lebih besar dibandingkan sektor lainnya kecuali sektor industri pengolahan (Lampiran 2).

Di dalam perekonomian nasional Indonesia, tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dilihat dari sumbangannya dalam pendapatan nasional maupun jumlah penduduk yang hidupnya tergantung kepadanya. Bahkan beberapa kali terbukti sektor pertanian menjadi semacam “penyangga” perekonomian nasional pada saat krisis dunia dan krisis ekonomi nasional (Mulyadi, 2008:217).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Pertanian menyangkut kehidupan banyak orang, tidak hanya generasi pada saat ini namun juga generasi yang akan datang.

Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi di Pulau Sumatera yang berupaya dalam meningkatkan perekonomian daerah terutama di bidang pertanian. Hal tersebut terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Sumatera Barat 2005-2025 (Sjafrizal, 2008:207).

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2017 tumbuh sebesar 5,29 persen. Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (23,55 persen), perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (15,05 persen) dan transportasi dan pergudangan (12,64 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2017, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,00 persen, diikuti transportasi dan pergudangan sebesar 0,84 persen dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,79 persen. PDRB Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada sektor pertanian dan harga konstan 2010, sektor kehutanan dan perikanan meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan. (Lampiran 3) (BPS Sumatera Barat, 2017).

Dewasa ini pembangunan ekonomi tidak lagi dikendalikan dari pusat tetapi sudah diserahkan kepada daerah provinsi, kabupaten atau kota masing-masing, sehingga suatu daerah dituntut agar dapat mencari dan mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menjadikan pembangunan di daerah yang bersangkutan maju dan mandiri. Hal ini diperkuat dengan berlakunya otonomi daerah yaitu adanya penetapan UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah-daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut maka setiap daerah harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan dapat menjadi sektor unggulan serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi didaerahnya, sehingga kebijakan yang dibuat sesuai dengan sasaran dan kebutuhan daerah yang bersangkutan (Permatasari, 2011:2, dalam Sadri, 2016).

Melalui pemberian otonomi yang besar pada daerah, maka saat ini dan masa mendatang keberhasilan pengembangan wilayah sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah terutama dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah harus mampu mengembangkan visi pengembangan wilayah masing-masing sesuai dengan nilai, arah dan tujuan yang akan mengarahkan masa depan yang bersangkutan (Daryanto & Hafizrianda, 2010:19).

Wacana pengembangan komoditi unggulan di Sumatera Barat bermula dari dilahirkannya konsep *One Vilage one Product* pada tahun 1997. Dari konsep dan gagasan ini kemudian lahir komoditi unggulan khas pada masing-masing daerah (Kabupaten/Kota) di Sumatera Barat. Komoditi unggulan yang telah disusun pada tahun 1997, kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2008 melalui suatu kesepakatan antar Pemerintah Kabupaten dan Kota. Pada tahun 2008, setiap Kabupaten/Kota telah menetapkan 2 atau 3 komoditi yang diunggulkan pada masing-masing Kabupaten/Kota (Lampiran 4) (Yolamalinda, 2015:220).

Hierarki yang dibentuk untuk menentukan skala prioritas komoditi unggulan disusun dalam tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah *ultime goal* yang

menjadi tujuan utama dari pembangunan wilayah yaitu mengejar target pertumbuhan ekonomi wilayah. Kemudian tingkat kedua yang menjadi *intermediate goal* berupa sektor-sektor ekonomi yang dapat diandalkan menjadi *prime mover* ekonomi wilayah, yakni sektor pertanian, industri dan jasa. Terakhir adalah tingkat ketiga kriteria-kriteria komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai tujuan dari pengembangan komoditas unggulan (Daryanto & Hafizrianda, 2010:37).

B. Rumusan Masalah

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2017 yang diukur berdasarkan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.214,585 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp.40,32 juta atau US\$3028,02. Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Sumatera Barat, dimana tahun 2017 memiliki kontribusi 23,55 persen pada PDRB Provinsi Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2017). Namun begitu, berbagai isu penting perlu menjadi perhatian, antara lain : (1) jumlah rumah tangga pertanian yang terus menurun dari 709.351 pada Survey Tahun (ST) 2003 menjadi 644,610 pada ST 2013; (2) pertumbuhan sektor pertanian yang cukup lambat yaitu tercatat 3,26 persen pada tahun 2017; (3) gejolak harga pangan yang saat ini makin menjadi tantangan Pemerintah, hingga program reformasi agraria yang dicanangkan untuk mengembalikan kedaulatan pangan Indonesia (BPS Sumatera Barat 2018).

Berdasarkan data BPS (2017) di Sumatera Barat sektor pertanian merupakan penyumbang utama dalam struktur perekonomiannya. Sebagian besar masyarakat Sumatera Barat bergerak di bidang pertanian (Lampiran 5). Banyaknya kendala-kendala dalam sektor pertanian menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam pertanian baik pada sektor hulu sampai hilir.

Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang dipriorotaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang paling baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2015:79).

Potensi antar daerah yang berbeda disebabkan oleh sumber daya alam, terbatasnya sarana dan prasarana, perbedaan kesuburan tanah maupun perbedaan kondisi daerah secara geografis (Herefa, 2010 dalam Iyan 2014:218). Diperlukan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dalam Iyan, 2014:218).

Walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pilihan jenis tanaman yang diusahakan petani hanya berdasarkan usaha turun temurun yang sudah dilakukan oleh orang tuanya terdahulu. Petani tidak pernah memperhatikan apakah usaha komoditi tersebut merupakan komoditi unggulan atau bukan.

Pemetaan komoditi unggulan yang telah ditetapkan dan disepakati pemerintah daerah antar Kabupaten/Kota belum disertai upaya pemerintah secara maksimal dalam mengembangkan komoditi unggulan tersebut sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Menjadikan produk unggulan daerah sebagai sebuah *world class product* masih terdapat beberapa kendala-kendala, seperti; *Uniqness* (Keunikan produk) yang tidak dikembangkan dan atau dipelajari mendalam makna keunikan produk yang dihasilkan, sehingga masih terjadi dalam memaknai keunggulan kompetensi inti yang dimiliki daerah, para pelaku ekonomi belum melakukan operasional secara lebih manajerial dan berorientasi mutu global; hal lain, seringkali masih terdapat kondisi rendahnya skala ekonomis, pelaku ekonomi seringkali tidak dapat memenuhi harapan memasuki area pasar yang lebih luas (Yolamalinda, 2015:223).

Dalam usaha memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah sekurang-kurangnya akan berkaitan dengan beberapa hal, salah satunya adalah mendorong tumbuhnya sektor penggerak utama atau sektor basis yang dimiliki perekonomian daerah tersebut. Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktifitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan (Sadri, 2016:6). Diperlukan skala prioritas sektor-sektor

perekonomian mana saja yang memberikan peluang peningkatan lapangan kerja perlu mendapat prioritas utama.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor penggerak utama atau unggulan dalam perekonomian suatu wilayah adalah melalui pendekatan *location quotient* dan *shift share analysis*. Melalui pendekatan *location quotient* dapat ditentukan sektor penggerak utama atau unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan *shift share analysis* menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan sektor unggulan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut mengingat besarnya potensi sektor pertanian yang dimiliki dan juga kontribusinya terhadap perekonomian Sumatera Barat maka perlu diteliti lebih lanjut menyangkut pemetaan komoditi unggulan sektor pertanian. Sehingga, perlu diketahui mengenai Kabupaten/Kota yang basis terhadap sektor pertanian untuk pengembangan sektor tersebut, serta komoditi unggulan di masing-masing Kabupaten/Kota yang basis terhadap sektor pertanian dan penyebabnya. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemetaan Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Di Provinsi Sumatera Barat”**

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota mana yang termasuk basis terhadap sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja komoditi pertanian unggulan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah antara lain:

1. Mengetahui Kabupaten/Kota yang basis terhadap sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui komoditi unggulan masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait sektor pertanian terutama untuk pengembangan komoditi unggulan masing-masing daerah Kabupaten/Kota.
2. Bagi akademisi dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi bagi penelitian sejenis dan informasi tambahan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan.
3. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan informasi serta sebagai bahan masukan untuk mengembangkan sektor pertanian.

